OMBUDSMAN NTT: PELAYANAN PUBLIK KOTA KUPANG PERLU DITINGKATKAN

Senin, 07 Oktober 2024 - ntt

KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT Darius Beda Daton menjadi narasumber kegiatan Simposium Reformasi Birokrasi Manajemen ASN Lingkup Pemerintah Kota Kupang bertempat Kantor Pusat Bank NTT, Kamis (3/10/2024). Hadir pada kesempatan tersebut Pj Walikota Kupang Linus Lusi, Ketua DPRD Kota Kupang Elvis Rodja, para pakar dari berbagai universitas di Kota Kupang, para asisten Setda Kota Kupang, para pimpinan perangkat daerah se-Kota Kupang dan mahasiswa.

Darius menyampaikan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Kupang tahun 2023 khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Dinas Sosial. Data hasil penilaian menunjukan bahwa pelayanan publik Kota Kupang masih tertinggal dari beberapa kabupaten/kota lain di NTT sehingga perlu ditingkatkan.

Karena itu seluruh unit layanan yang dinilai agar mencermati hasil penilaian secara serius dan melengkapi seluruh instrumen yang dinilai masih kurang. Perbaikan pelayanan publik adalah tugas utama pemerintah dan jangan pernah mengukur peningkatan kualitas pelayanan publik semata-mata karena ada insentif fiskal bagi daerah dan pegawai. "Sebagai kota yang berada di ibu kota provinsi, saya berpesan agar Kota Kupang bisa menjadi barometer pelayanan publik yang berkualitas dan menjadi contoh dari kabupaten/kota lain se-NTT," tegas Darius.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT selalu siap berkolaborasi dan membangun sinergi dengan seluruh pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih khususnya pada area pelayanan publik. Masukan dari forum tersebut dirangkai dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama antara Ketua DPRD dan Pj. Walikota Kupang untuk mendukung berbagai upaya reformasi birokrasi menyeluruh di Kota Kupang demi peningatan kesejahteraan warga Kota Kupang. Darius menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang atas keberaniannya menyelenggarakan simposium yang sangat terbuka untuk seluruh saran dan kritik untuk perbaikan ke depan.

Dalam acara tersebut, Pj. Walikota Kupang turut menyampaikan kegundahannya terkait manajemen birokrasi di Kota Kupang secara umum dan bertekad untuk menerapkan model birokrasi yang bersih dan akuntabel mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena Kota Kupang adalah kota heterogen dan menjadi rumah kita bersama maka manajemen birokrasinya harus profesional dengan merit sistem dan tidak semata-mata menempatkan birokrat dengan pertimbangan suku, agama dan ras agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Menyambut semangat Pj. Walikota Kupang, para pimpinan perangkat daerah dengan bebas menyampaikan unek-uneknya terkait manajemen birokrasi selama ini.

Menurutnya, rekrutmen jabatan di birokrasi belum mempertimbangkan kompetensi pegawai dan masih mengedepankan unsur kedekatan, suku, agama dan ras sehingga banyak pegawai yang memiliki kompetensi mumpuni tidak diberi kesempatan menduduki jabatan tertentu. Hingga saat ini masih terdapat lebih dari 70 jabatan yang lowong sehingga ikut mengganggu pelayanan publik di Kota Kupang.